



Air PDAM ke DPRD Ngadat

# Dewan dan Pegawai Kelimpungan

Amlapura (Bali Post) -

Aliran air PDAM Karangasem sejak Kamis (2/7) sampai Jumat (3/7) kemarin ngadat. Akibatnya, anggota dewan dan pegawai di lingkungan DPRD kelimpungan karena tak bisa buang air.

Dari pantauan kemarin, ada rapat gabungan komisi dengan eksekutif. Penghuni gedung megah DPRD Karangasem itu tampak kelimpungan ke mana buang air. Salah seorang pegawai kontrak mengatakan, macetnya air PDAM sudah terjadi sejak Kamis lalu. "Saya tak bisa buang air. Soalnya, WC baunya menyengat, kami tak mampu menghirup bau tak sedap di WC," ujar seorang pegawai.

kontrak.

Di lain pihak, anggota DPRD Gede Dauh Suprpta di sela-sela rapat gabungan komisi tampak kebingungan. Dia bolak-balik ke luar masuk ruang rapat hendak mencari WC. Namun semuanya tak ada airnya.

Dauh asal Tianyar Barat Kubu lantas mendekati wartawan, menyampaikan kondisi aliran air PDAM yang macet.

Dauh mengatakan, dewan sejak dua hari lalu membahas

Ranperda penyertaan modal untuk PDAM Karangasem. Tak tanggung-tanggung modal yang diusulkan mencapai Rp 2,4 miliar. Dia lantas mempertanyakan, terus minta penyertaan modal, sementara pelayanan air PDAM kerap dikeluhkan. "Di gedung DPRD saja saat membahas penyertaan modal PDAM air PDAM-nya ngadat sampai penghuni gedung dewan tak bisa ke kamar mandi. Bagaimana dengan rakyat di pedesaan apakah mer-

eka lancar mendapatkan air bersih?" ujar Dauh Suprpta sengit.

Diduga, aliran air dari pipa PDAM di jalur Jalan Ngurah Rai itu bermasalah, sehingga aliran air ke masyarakat dan gedung Dewan juga macet. Direktur PDAM Gede T. Baktiyasa, S.H. belum berhasil dikonfirmasi. Dia kemarin tak hadir dalam rapat gabungan komisi membahas pengajuan Ranperda penyertaan modal itu.

Sekda Karangasem Ir. Gede Adnya Mulyadi yang juga selaku Ketua Badan Pengawas PDAM mengatakan, mohon maaf atas ketidakhadiran Direktur PDAM. Sekda

juga tak mengetahui ke mana tugas Direktur PDAM.

Sekda Adnya mengatakan, sebenarnya target keuntungan PDAM tahun 2014 Rp 1,8 miliar. Namun dari audit BPK, diketahui keuntungannya Rp 2,4 miliar. Karena itu, keuntungan PDAM seluruhnya disertakan kembali di perusahaan daerah itu. Sampai 31 Desember 2014, sudah tercatat penyertaan modal Pemkab Karangasem ke PDAM mencapai Rp 21 miliar dan jika disetujui penyertaan modal lagi Rp 2,4 miliar tahun ini, maka nantinya penyertaan modal ke PDAM sudah mencapai Rp 23,4 miliar. (013)



## Dikhawatirkan Kurangi Estetika Kawasan

# Pemkab Rancang Master Plan Reklame



REKLAME - Aparat Satpol PP Gianyar menertibkan reklame yang melanggar ketentuan.

Gianyar (Bali Post) -

Menjamurnya reklame, baliho, pamphlet, dan berbagai jenis alat peraga iklan lainnya menjadi persoalan tersendiri di Kabupaten Gianyar. Pasalnya, maraknya pemasangan di tepi jalan khususnya yang melanggar ketentuan dikhawatirkan mengurangi nilai estetika kawasan. Pemkab Gianyar pun berencana menyusun *master plan* reklame.

Kepala Bidang Data dan Pengembangan Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Gianyar Komang Alit Adnyana, Jumat (3/7) kemarin, mengungkapkan, untuk saat ini Pemkab Gianyar belum memiliki *master plan* reklame. Namun demikian, pemerintah dalam upaya melakukan penataan reklame dan berbagai jenis alat peraga iklan lainnya sebenarnya memiliki acuan atau dasar hukum peraturan daerah (perda).

Perda dimaksud yakni Perda nomor 9 tahun 2010 tentang Pajak Reklame dan Perda nomor 12 tahun 1992 tentang Kebersihan dan Kertibatan Umum. "*Master plan*-nya sekarang belum punya. Tapi kita menggunakan acuan dua perda itu," katanya. Dipaparkannya, payung

hukum berupa perda tersebut dinilai masih belum mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul dari maraknya pemasangan reklame yang ke depan dikhawatirkan makin marak seiring perkembangan pembangunan di Gianyar. Untuk itu, BPPT berencana merancang *master plan* terutama dalam rangka menata reklame dan baliho berukuran besar.

Dari perencanaan awal, *master plan* bakal mempertimbangkan nilai strategis sebuah kawasan. Seperti misalnya kepadatan lalu lintas dan jangkauan reklame. "Ini sedang kami kaji seperti apa. Nantinya kita juga akan coba mencari perbandingan di daerah lain," ujarnya.

Lebih lanjut Alit Adnyana menjelaskan, dengan adanya master

plan reklame dan penyempurnaan aturan, ke depan diharapkan tata letak termasuk jumlah ideal reklame di suatu kawasan dapat lebih teratur. Dengan demikian, estetika kawasan bisa tetap terjaga.

Dia menegaskan, estetika, kebersihan dan kenyamanan kawasan adalah salah satu komitmen Pemkab Gianyar dalam mendukung program Gianyar menuju Kabupaten Layak Anak. Nilai pendapatan daerah dari pajak reklame bukan hal utama. Untuk diketahui, pendapatan daerah yang disumbangkan dari pajak reklame tahun 2014 lalu terealisasi sebesar Rp 2,9 miliar atau melampaui target yang dirancang Rp 2,7 miliar. Sedangkan tahun 2015 ini, target pajak reklame dirancang Rp 3 miliar. (kmb25)

Edisi : Sabtu, 4 Juli 2015

Hal : 11



# Penyertaan Modal PDAM Jadi Sorotan

Suntikan modal untuk PDAM dari eksekutif yang dilakukan hingga dua kali setahun, dengan nilai miliaran rupiah itu dinilai kurang etis. Juga dipertanyakan, hitungan balik modal dan berapa banyak keuntungannya.

AMLAPURA, NusaBali

Kalangan anggota DPRD Karangasem menyoroti dan mengkritisi penyertaan modal ke PDAM Karangasem yang. Apalagi penyertaan modal dari eksekutif, dua kali setahun, hal itu dinilai kurang etis. Juga dipertanyakan,

hitung-hitungan balik modal, dan seberapa banyak keuntungan dari modal tersebut.

Hal itu terungkap dalam rapat gabungan komisi dipimpin Ketua DPRD I Nengah Sumardi, didampingi Wakil Ketua I Nyoman Karya Kartika dan Ida Bagus Adnyana yang digelar di Ruang Rapat DPRD, Jumat (3/7). Sementara pihak eksekutif yang

dipimpin Sekkab I Gede Adnya Muliadi yang sibuk mengklarifikasi pertanyaan dewan di

Ketua Komisi I DPRD I Komang Sudanta, menyoroti penyertaan modal ke PDAM dua kali dalam satu tahun, kurang etis. "Bagaimana hitung-hitungannya, berapa keuntungan didapatkan dari penyertaan modal itu. Kenapa tidak sebaiknya melakukan



• NUSABALI/NANTRA

I Komang Sudanta (kanan) kritisi penyertaan modal Pemkab ke PDAM di dalam rapat di DPRD, Jumat (3/7).

penyertaan modal yang jelas-jelas menguntungkan seperti di Bank BPD," katanya.

Anggota I Wayan Sumatra juga mengingatkan, kondisi APBD Karangasem tingkat kemandiriannya cukup rendah, masih tergantung dari penyertaan dari pusat dan provinsi. Sehingga perlu berhati-hati melakukan penyertaan modal.

Anggota dewan lainnya, I Wayan Sunarta, juga mengingatkan, jika penyertaan modal dari Pemkab Karangasem ke PDAM, bisa saja menyangkut aset nantinya bermasalah. "Saya hanya pertanyakan, aset itu nantinya milik siapa?" tanya Sunarta.

Anggota lainnya I Wayan Suastika juga menyoroti hal itu. Sebab, yang dibicarakan me-

nyangkut penambahan modal, itu berarti sebelumnya juga ada penyertaan modal yang dilandasi perda yang mengatur.

Sekcab Adnya Muliadi menengarakan sebenarnya penyertaan modal di tahun 2015, bukanlah dua kali. Mulanya di anggaran induk Rp 1,8 miliar karena belum ada perda mengatur, disusul APBD

Perubahan 2015, Rp 600 juta. "Sebenarnya penyertaan modal sekali, ditotal Rp 2,4 miliar," kata Adnya Muliadi.

Sekcab Muliadi juga memaparkan penyertaan modal ke PDAM dari tahun 2010 hingga 31 Desember 2014 Rp 21,2 miliar, nantinya hingga tahun 2015, modal tersetor Rp 23,39 miliar.

Kabag Keuangan Setdakab Karangasem I Dewa Ari Menaka juga meluruskan, penyertaan modal ke PDAM itu berasal dari dana laba PDAM yang sebelumnya tersetorkan ke kas daerah. "Laba PDAM itu terlebih dahulu disetorkan ke kas daerah, sebagai pendapatan, selanjutnya dikembalikan ke PDAM dalam bentuk penyertaan modal," jelas Ari Menaka.

Anggota DPRD I Nengah Sudarsa juga meluruskan, dan memberikan pemahaman mengenai penyertaan modal ke PDAM. "Pencairan penyertaan modal ke PDAM, atas audit BPK. Sehingga besarnya ditentukan untuk tahun 2015, Rp 2,4 miliar," katanya. **k16**

Edisi : Sabtu, 4 Juli 2015

Hal : 8



★ Terungkap Saat Komisi III DPRD Cek Lokasi

# Perkebunan PD Swatantra

## 'Panen' Masalah

Puluhan hektare lahan yang dikelola ternyata tidak produktif karena berlahan bebatuan dan konturnya curam. Pekerja penyakap juga minim dengan upah sangat rendah.



• NUSABALI/SUDIRTA

ROMBONGAN Komisi III saat mendengar keterangan dari salah satu penyakap di perkebunan kopi di Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan

SINGARAJA, NusaBali

Sektor perkebunan yang dikelola PD Swatantra ternyata menyimpan banyak persoalan. Mulai dari umur tanaman hingga jumlah penyakap (pekerja) sangat mengganggu produksi panen tiap tahunnya. PD Swatantra pun tidak bisa berbuat banyak selama ini hingga produktivitas dan pendapatan yang didapatkan relatif rendah.

Hal itu terungkap ketika rombongan Komisi III DPRD Buleleng mengecek salah satu lokasi perkebunan yang dikelola PD Swatantra, di Desa Mengening, Kecamatan Kubutambahan, Jumat (3/7) pagi. Rombongan dipimpin oleh Ketua Komisi III, Ni Made Putri Nareni didampingi Dir Pengelolaan PD Swatantra, Gede Pilot.

Luas perkebunan yang dikelola PD Swatantra di Desa Mengening mencapai sekitar 27 hektare, masuk dalam area blok 1-3. Sedangkan

di Desa Tajun perbatasan Desa Menengening, luas perkebunan mencapai kurang lebih 18 hektare, masuk dalam area blok 4-6. Di atas lahan tersebut sebagian besar adalah perkebunan kopi dan cengkeh.

Salah satu penyakap I Wayan Togog mengungkapkan, dari luas lahan yang ada di Desa Mengening, hanya 40 persennya yang bisa ditanami, karena struktur lahan bebatuan dan memiliki kemiringan yang curam. Selain struktur lahan bebatuan dan tebing curam, usia tanaman kopi juga

tidak lagi produktif. Dikatakan, usia tanaman kopi saat ini sudah diatas 40 tahun, padahal usia produktif tanaman kopi rata-rata antara 12-25 tahun. "Punya wedange driki sampun tua nike, sampun kidik mebuah. (tanaman kopi di sini sudah pada tua-tua, sehingga tidak lagi produktif berbuah," ungkapnya.

Wayan Togog juga menambahkan, jumlah penyakap yang dipekerjakan di perkebunan kopi di Desa Mengening hanya 11 orang. Dengan jumlah itu, tidak bisa maksimal mengelola perkebunan dengan luas 27 hektare. Idealnya kata Togog, satu hektar lahan dikerjakan oleh minimal satu orang. Disamping itu, upah yang mereka terima juga sangat jauh dari hara-

pan. Mereka hanya mendapat upah Rp 15 ribu perhari. Sehingga, pekerjaan di perkebunan dijadikan sambilan karena ada pekerjaan yang memberikan pendapatan lebih besar di luar seperti buruh tukang.

Kondisi itu diakui oleh Dir Pengelolaan PD Swatantra, Gede Pilot dengan menyebut panen terakhir yang didapat hanya berkisar Rp

260 juta belum dipotong biaya produksi. Gede Pilot mengaku, pihaknya tidak bisa merubah jenis tanaman di lahan perkebunan di Desa Mengening karena daerah tersebut merupakan daerah rawan longsor, sehingga jenis tanaman yang diizinkan hanya kopi. "Kami hanya dibolehkan tanam kopi sesuai SK, sehingga kami tidak bisa merubah ke jenis tanaman lain yang lebih produktif," ucapnya.

Sementara Ketua Komisi III, Putri Nareni justru menilai turunnyanya produktivitas itu karena pengawasan yang kurang. Apalagi dengan kondisi lokasi perkebunan yang terjal dan bertebing, sangat memungkinkan pengawasan tidak sampai ke lokasi. Pihaknya pun minta agar PD Swatantra lebih aktif turun ke lokasi pengawasan perkembangan perkebunan. "Lahan-lahan ini harus diawasi lebih baik agar tidak ada kerugian baik yang disebabkan oleh panen yang kurang maksimal ataupun kurangnya pengawasan detail dari hasil panen sesungguhnya," tegas Putri Nareni. **k19**

Edisi : Sabtu, 4 Juli 2015

Hal : 4